



Kekacauan Respons terhadap COVID-19 di Indonesia

Oleh

A. Ibrahim Almuttaqi

Kepala Departemen Kajian ASEAN di The Habibie Center

ibrahim@habibiecenter.or.id

Pendahuluan

Pada 2 Maret 2020, Presiden Joko 'Jokowi' Widodo mengumumkan kasus pertama (dan kedua) positif terinfeksi virus korona baru, atau terkena penyakit COVID-19, di Indonesia. Belakangan diketahui bahwa dua orang (perempuan berusia 31 tahun dan ibunya berusia 64 tahun) mengetahui status mereka yang terinfeksi dari berita, dan bahwa Presiden mengumumkan hal tersebut kepada publik sebelum petugas kesehatan memberitahukan kepada mereka secara langsung.¹ Insiden ini hanya salah satu kesalahan dari banyak langkah besar yang diambil pemerintah yang menimbulkan pertanyaan serius mengenai kemampuan menanggapi pandemik global ini. Meskipun fokus utama memang wajib ditujukan untuk merawat mereka yang sudah terinfeksi dan mencegah penyebaran lebih lanjut, penyelidikan yang komprehensif juga harus segera dilakukan di saat yang tepat untuk memeriksa kesalahan serius yang telah dibuat sehingga membahayakan kehidupan masyarakat. Indonesia harus lebih siap di masa depan.

'Enjoy Aja'

Sejak berita mulai muncul pada akhir Desember 2019 tentang virus baru yang mengkhawatirkan menyebar melalui provinsi Wuhan di Cina, para ahli kesehatan mulai meningkatkan kesiagaan, dan pada 30 Januari 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) secara resmi menetapkan tahap 'darurat kesehatan global' setelah 213 kasus meninggal dan 9.692 kasus dari seluruh 31 provinsi Cina dilaporkan.² Setelahnya, negara lain seperti India, Filipina, beberapa negara di Eropa, Australia, Jepang, Singapura, Vietnam, dan Amerika Serikat melaporkan kasus positif. Sementara itu, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Terawan Agus Putranto berusaha untuk mengecilkan keadaan darurat kesehatan global dengan mengatakan kepada masyarakat, "Jangan panik, jangan resah. Enjoy saja. Makan yang cukup, gaya hidup sehat. Kalau



flu, batuk, ya pakai masker.”³ Niat Menteri Kesehatan mungkin untuk menenangkan publik – yang tentu dibutuhkan, tapi pesan untuk “enjoy aja” terlihat meremehkan dan menganggap enteng masalah yang sangat serius dan mematikan.

Beberapa minggu kemudian, ketika Indonesia secara mengejutkan masih menjadi salah satu dari sedikit negara besar di Asia yang tidak memiliki kasus positif COVID-19 – meskipun dengan adanya penerbangan langsung dari Wuhan yang tidak dihentikan hingga 23 Januari 2020 – Menteri Terawan yang dikenal religius kembali mengejutkan publik dengan mengklaim situasi tersebut sebagai “berkah dari yang Maha Kuasa.”⁴ Ia juga mengatakan bahwa studi yang dilakukan oleh beberapa peneliti dari Universitas Harvard, yang menyatakan bahwa Indonesia mungkin memiliki kasus yang tidak terdeteksi, sebagai sebuah “penghinaan.”⁵

Prioritas yang Salah

Meskipun ada banyak pertanyaan terkait status Indonesia yang ‘bebas virus korona’, pemerintah awalnya berupaya untuk memanfaatkan situasi yang ada. Setelah rapat kabinet pada 25 Februari 2020, Presiden Jokowi mengeluarkan empat instruksi untuk mengantisipasi dampak COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia, yang mana di antaranya adalah dengan memaksimalkan kegiatan konferensi dalam negeri, MICE (*Meeting, Incentive, Convention and Exhibition*), serta meningkatkan promosi untuk menyasar pasar wisatawan mancanegara yang mencari alternatif destinasi wisata akibat batal mengunjungi Cina, Korea, dan Jepang (yang pada saat itu merupakan tiga negara paling terdampak oleh COVID-19).⁶ Pada saat yang sama, pemerintah menyiapkan 72 miliar rupiah (5.2 juta dollar AS) untuk membayar orang-orang yang berpengaruh di media sosial (*influencers*) untuk mempromosikan Indonesia sebagai tujuan wisata.⁷

Pada saat negara-negara lain berusaha memperlambat penyebaran COVID-19 dengan memberlakukan pembatasan perjalanan, Indonesia malah mendorong sebanyak mungkin wisatawan agar datang berkunjung. Alih-alih menggunakan dana negara untuk memberi informasi kepada masyarakat tentang tindakan pencegahan kesehatan dasar, pemerintah malah berencana membelanjakannya untuk kampanye daring pariwisata.

Kemudian, ketika Arab Saudi memberlakukan pembatasan perjalanan – termasuk penangguhan semua jamaah umrah asing – demi kepentingan kesehatan dan keselamatan publik, Indonesia awalnya mencari semacam fleksibilitas dari Riyadh, mengingat statusnya sebagai negara ‘bebas virus korona’⁸, sekalipun terdapat risiko para jamaah dapat terinfeksi dan membawanya ke Indonesia. Hal ini mengindikasikan





bahwa pemerintah Indonesia masih mengadopsi pola pikir *economic developmentalist*, dengan mengorbankan situasi darurat kesehatan global.

Sebuah Kekacauan

Setelah melihat ketidaksiapan pemerintah Indonesia yang malah bersikap santai sebelum kasus pertama COVID-19 dikonfirmasi, pengumuman Presiden Jokowi pada 2 Maret diharapkan akan memusatkan pikiran para pejabat pemerintah dalam menghadapi kenyataan pahit ini. Lebih lanjut pemerintah juga diharapkan akan melakukan tindakan bersama dan menghadirkan pendekatan yang lebih terkoordinasi, responsif, dan komprehensif. Sayangnya, hingga saat ini tidak ada satu pun dari harapan tersebut yang terwujud.

Walaupun para ahli menyoroti pentingnya keterbukaan dan transparansi sebagai salah satu 'kunci utama dari respons efektif di beberapa negara', Presiden sebaliknya mengakui, "Kami tidak ingin menciptakan rasa panik, tidak ingin menciptakan keresahan di tengah masyarakat. Oleh sebab itu dalam penanganan memang kami tidak bersuara."⁹ Hal tersebut termasuk lokasi kasus positif COVID-19 di Indonesia, yang menyebabkan pemerintah daerah frustrasi dan kemudian membuat pengumuman mereka sendiri. Seperti yang dikatakan oleh seorang komentator, "Salah satu alasan mengapa pemerintah daerah mulai bertindak sendiri adalah karena mereka kehilangan kepercayaan kepada kemampuan Jokowi untuk mengendalikan wabah ini."¹⁰ Perpecahan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi jelas ketika Presiden secara terbuka mengingatkan bahwa kebijakan *lockdown* tidak boleh diambil oleh pemerintah daerah, itu kebijakan pemerintah pusat.¹¹

Selain perang mulut dengan pemerintah daerah, pemerintah Indonesia juga terlibat percek-cokan dengan negara tetangga Singapura setelah Achmad Yurianto, juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, menuduh Singapura menyembunyikan informasi.¹² Yang memalukan bagi Jakarta, Kementerian Kesehatan Singapura menunjukkan bahwa pihaknya telah 'dengan cepat membagikan informasi kepada Indonesia melalui saluran resmi IHR (*International Health Regulations*/Regulasi Kesehatan Internasional) mengenai kasus positif COVID-19 yang melibatkan orang Indonesia, untuk memfasilitasi pelacakan kontak di Indonesia' – yang telah dikonfirmasi oleh juru bicara nasional IHR Indonesia di Kementerian Kesehatan Indonesia.¹³ Kurangnya komunikasi antara pejabat Indonesia pasti telah membuat Singapura bingung.

Hal lain yang memalukan dari Indonesia, setidaknya dua pasien melarikan diri dari rumah sakit (satu





kasus positif dari RSUP Persahabatan di Jakarta dan satu kasus *suspect* dari RS Mardi Rahayu di Kudus) dimana mereka seharusnya diisolasi.¹⁴ Dalam sebuah studi kasus tentang kinerja menyedihkan Indonesia, masyarakat baru diberitahu tentang kasus pelarian pertama seminggu setelah insiden terjadi dan para pihak berwenang pun tidak tahu ke mana pasien melarikan diri. Achmad Yurianto kemudian menyangkal bahwa pasien melarikan diri, dengan mengklaim bahwa orang tersebut hanya kembali ke rumah selama sehari dan kemudian masuk ke rumah sakit lain.¹⁵ Kasus ini sekaligus mengungkap bahwa pasien tersebut meragukan hasil pemeriksaan terhadapnya dan enggan berada di ruang isolasi bersama dengan pasien lain, karena merasa takut akan terinfeksi jika ia tinggal di rumah sakit. Keadaan yang menyedihkan ini bisa dibilang menunjukkan kurangnya kepercayaan publik kepada para pejabat pemerintah.

Analisis

Hal-hal di atas menunjukkan banyaknya kesalahan langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam menangani pandemi global COVID-19. Kita bahkan belum membahas buruknya kemampuan pengujian (per 19 Maret 2020, hanya 1.592 tes yang telah dilakukan di negara berpenduduk 270 juta orang sedangkan Korea Selatan telah melakukan lebih dari 220.000 tes meskipun populasinya jauh lebih kecil yaitu 51 juta orang)¹⁶ atau kurangnya alat pelindung bagi petugas medis (yang akhirnya sebagian menggunakan jas hujan).¹⁷ Sebagai negara berkembang dengan sistem perawatan kesehatan yang terbatas, beberapa masalah memang sudah dapat diperkirakan. Namun, kesalahan tidak perlu yang dilakukan oleh pemerintah sendiri tidak dapat diterima.

Meskipun fokus utama memang wajib ditujukan untuk merawat mereka yang sudah terinfeksi dan mencegah penyebaran lebih lanjut, penyelidikan yang komprehensif juga harus segera dilakukan di saat yang tepat untuk memeriksa kesalahan serius yang telah dibuat dan membahayakan kehidupan masyarakat. Investigasi tersebut harus melibatkan anggota parlemen, pakar medis, akademisi, dan kelompok sipil dengan tujuan mengidentifikasi apa yang salah, siapa yang melakukan kesalahan langkah, dan bagaimana memastikan hal itu tidak terjadi lagi. Indonesia harus lebih siap menghadapi keadaan darurat kesehatan masyarakat di masa depan.



Endnotes

- 1 Arcana, P.F. (2020, March 3). 'Wawancara Khusus Kompas: Pasien Covid-19 Mengaku Tertekan.' *Harian Kompas*. Retrieved from: <https://kompas.id/baca/bebas-akses/2020/03/03/wawancara-khusus-kompas-pasien-covid-19-mengaku-tertekan/>
- 2 AlJazeera (2020, January 20). 'WHO declares coronavirus global emergency as death toll rises.' Retrieved from: <https://www.aljazeera.com/news/2020/01/declares-coronavirus-global-emergency-death-toll-rises-200130231243350.html>
- 3 The Jakarta Post (2020, January 27). 'Don't panic, stay healthy and pray, says minister in response to coronavirus fears.' Retrieved from: <https://www.thejakartapost.com/news/2020/01/27/dont-panic-pray-says-minister-in-response-to-coronavirus-fears.html>
- 4 Today Online (2020, February 28). 'Indonesia says lack of Covid-19 cases a blessing from God.' Retrieved from: <https://www.todayonline.com/world/indonesia-says-lack-covid-19-cases-blessing-god>
- 5 The Jakarta Post (2020, February 12). 'It's insulting': Indonesia criticizes US study concerns over no coronavirus cases.' Retrieved from: <https://www.thejakartapost.com/news/2020/02/12/its-insulting-indonesia-criticizes-us-study-concerns-over-no-coronavirus-cases.html>
- 6 Lihat: Sekretariat Kabinet RI's official Twitter post: <https://twitter.com/setkabgoid/status/1233591447997149184/photo/1>
- 7 Tempo (2020, February, 28). 'Rp 72 Miliar untuk Influencer': Cara Indonesia Merespon Virus Corona.' Retrieved from: <https://www.tempo.co/abc/5348/rp-72-miliar-untuk-influencer-cara-indonesia-merespon-virus-corona>
- 8 Kumparan (2020, February 29). 'Pemerintah Negosiasi ke Saudi soal Umrah: Tak Perlu Ragu, Indonesia Bebas Corona.' Retrieved from: <https://kumparan.com/kumparannews/pemerintah-negosiasi-ke-saudi-soal-umrah-tak-perlu-ragu-indonesia-bebas-corona-1svv34xvtpj>
- 9 Kavanagh, M. (2020, March 16). 'Transparency and Testing Work Better Than Coercion in Coronavirus Battle.' *Foreign Policy* Retrieved from: <https://foreignpolicy.com/2020/03/16/coronavirus-what-works-transparency-testing-coercion/>
- 10 and Pangestika, D. (2020, March 14). 'We don't want people to panic': Jokowi says on lack of transparency about COVID cases.' *The Jakarta Post*. Retrieved from: <https://www.thejakartapost.com/news/2020/03/13/we-dont-want-people-to-panic-jokowi-says-on-lack-of-transparency-about-covid-cases.html>
- 10 Bland, B. (2020, March 18). 'COVID-10 reveals cracks in Indonesia's leadership.' *Channel News Asia*. Retrieved from: <https://www.channelnewsasia.com/news/commentary/covid-19-coronavirus-jokowi-indonesia-government-response-health-12551876>
- 11 Tempo (2020, March 16). 'Jokowi: Only Central Govt Has Right to Initiate Lockdown.' Retrieved from: <https://en.tempo.co/read/1320209/jokowi-only-central-govt-has-right-to-initiate-lockdown>
- 12 Gorbiano M.I., Fahcriansyah, R. and Hermawan, A. (2020, March 13). 'Indonesia slams Singapore for withholding information on nationals treated for COVID-19.' *The Jakarta Post*. Retrieved from: <https://www.thejakartapost.com/sea-sia/2020/03/13/indonesia-slams-singapore-for-withholding-information-on-nationals-treated-for-covid-19.html>
- 13 Min, A.H. (2020, March 13). 'Singapore has 'promptly shared information' with Indonesia on COVID-19 cases involving Indonesians: MOH.' *Channel News Asia*. Retrieved from: <https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/singapore-has-promptly-shared-information-with-indonesia-on-12536610>
- 14 CNN Indonesia (2020, March 13). 'Pasien Positif Corona Kabur dari RSUP Persahabatan.' Retrieved from: <https://www.cnnindonesia.com/news/20200314080010-4-144844/kok-bisa-satu-pasien-corona-kabur-dari-rs-persahabatan>
- and Kompas.com (2020, March 17). 'Menolak Diisolasi, Pasien Suspect Corona di Kudus Kabur dari Rumah Sakit.' Retrieved from: <https://regional.kompas.com/read/2020/03/17/16321901/menolak-diisolasi-pasien-suspect-corona-di-kudus-kabur-dari-rumah-sakit>





THC INSIGHTS

No. 13 / 23 Maret 2020
www.habibiecenter.or.id

- 15 Sembiring, L.J. (2020, March 14). 'Kok Bisa Satu Pasien Corona Kabur Dari RS Persahabatan?' CNBC Indonesia. Retrieved from: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200314080010-4-144844/kok-bisa-satu-pasien-corona-kabur-dari-rs-persahabatan>
- 16 Suroyo, G. and Allard, T. (2020 March 17). 'Indonesia warns of escalating coronavirus cases, adds restrictions on foreign travellers.' Reuters. Retrieved from: <https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-indonesia-travel-int/indonesia-warns-of-escalating-coronavirus-cases-adds-restrictions-on-foreign-travellers-idUSKBN2141FL>
- 17 Tahir, R.F. (2020, March 18). 'RS Rujukan Corona di Sultra Kekurangan APD, Pakai Jas Hujan.' Tempo. Retrieved from: <https://nasional.tempo.co/read/1321045/rs-rujukan-corona-di-sultra-kekurangan-apd-pakai-jas-hujan>





THC INSIGHTS

THC Insights are timely and policy-relevant analysis of current political, economic and socio-cultural issues affecting Indonesia and the region. The expert observations and recommendations are produced by researchers at The Habibie Center. Disclaimer: The opinions expressed in this article are those of the author and do not necessarily represent those of The Habibie Center.

The Habibie Center was founded by Bacharuddin Jusuf Habibie and family in 1999 as an independent, non-government, non-profit organisation. The vision of The Habibie Center is to create a structurally democratic society founded on the morality and integrity of cultural and religious values. The mission of The Habibie Center are first, to establish a structurally and culturally democratic society that recognizes, respects, and promotes human rights by undertaking study and advocacy of issues related to democratization and human rights, and second, to increase the effectiveness of the management of human resources and the spread of technology.

Contact:

The Habibie Center

Jl. Kemang Selatan No. 98, Jakarta 12560

Tel: +62 21 781 7211 | Fax: +62 21 781 7212

Email: thc@habibiecenter.or.id

Website: www.habibiecenter.or.id